



**Jurnal Riset Terapan Akuntansi  
Politeknik Negeri Sriwijaya**



**PENGARAH**  
Aladin

**KETUA DEWAN REDAKSI**  
Evada Dewata

**WAKIL KETUA DEWAN REDAKSI**  
Lambok Vera Riama Pangaribuan

**ANGGOTA DEWAN REDAKSI**  
Yuliana Sari  
Faridah  
Muhammad Husni Mubarak  
Sri Hartaty  
Yevi Dwitayanti  
Maulan Irwadi  
Citra Dewi Sartika

**MITRA BASTARI**

**Rita Martini**      **Lukluk Fuadah**  
*Politeknik Negeri Sriwijaya*      *Universitas Sriwijaya*

**Memed Sueb**      **Agus Widarsono**  
*Universitas Padjajaran*      *Universitas Pendidikan Indonesia*

**Nuzulul Hidayat**      **M. Iqbal A.**  
*Universitas Persada Indonesia*      *Universitas Tadulako, Palu*

**Wing Wahyu Winarno**  
*STMIK Amikom*

**PUBLIKASI**

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya  
Jalan Srijaya Negara Bukit Besar – Palembang 30139  
Telp. 0711-353414 Fax. 0711-355918

**EDITORIAL**

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya  
Jalan Srijaya Negara Bukit Besar – Palembang 30139  
Telp. 0711-353414 Ext. 1048 Fax. 0711-355918  
Website: jurnal.polsri.ac.id Email: jrtap@polsri.ac.id



**Jurnal Riset Terapan Akuntansi  
Politeknik Negeri Sriwijaya**

Volume 2, Nomor 2 Juli 2018

ISSN : 2579-969X

**DAFTAR ISI**

Faktor-Faktor Demografi yang Berdampak terhadap Kepatuhan WP Badan (UMKM) di Kota Palembang <b>(Ardiyanto, Sopiyan AR, Indra Satriawan, dan Periansya)</b> .....	101-115
Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) pada PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk (Bukithijau Estate) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016. <b>(Dheo Rimban)</b> .....	116-133
Analisis Persepsi Efektivitas Tax Amnesty dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kabupaten Musi Banyuasin <b>(Dian Ofasari, dan Mardiana Sunanto)</b> .....	134-142
Determinan Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten / Kota di Propinsi Sumatera Selatan <b>(Lambok Vera Riama Pangaribuan, Sri Hartaty, Aladin, Siska Aprianti, dan Rany Shinta Dewi)</b> .....	143-148
Efektivitas Penagihan Piutang pada PDAM Kabupaten Banyuasin (Studi Kasus Pada PDAM Banyuasin). <b>(Niken Ayuningrum, dan Ryan Al Rachmat)</b> .....	149-152
Kinerja Keuangan terhadap Harga Saham Perusahaan Pertanian Sub Sektor Perkebunan. <b>(Rita Martini, Annisa Pratiwi, dan Alkaton Di Antonio)</b> .....	153-160
Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada PT. Bank Muamalat Indonesia. <b>(Yevi Dwitayant<sup>1</sup>, Rosy Armaini, dan Kartika Rachmasari)</b> .....	161-168
Pengaruh Kecanduan <i>Game Online</i> terhadap Perilaku Konsumtif Siswa Pengguna <i>Game Online</i> <b>(Yusnizal Firdaus, Yulia Pebrianti, Titi Andriyani)</b> .....	169-180
Kebijakan Editorial .....	181-182
Ketentuan Penulisan Naskah JRTA .....	183-184



## **PENGANTAR REDAKSI**

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya Jurnal Riset Terapan Akuntansi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya ini dapat diterbitkan.

Jurnal Riset Terapan Akuntansi (JRТА) adalah jurnal untuk mengembangkan kajian manajemen, akuntansi, pajak, auditing dan system informasi dan memberikan sarana bagi publikasi hasil kajian empiris berkaitan dengan interaksi antara manajemen, akuntansi, pajak, auditing dan system informasi dengan lingkungan sosial, ekonomi, budaya dan politik. Jurnal ini diharapkan dapat mendorong munculnya analisis kritis dan empiris atas kebijakan dan praktik yang berkaitan dengan manajemen, akuntansi, pajak, auditing dan system informasi. Analisis dapat bersifat internasional, nasional atau organisasi dengan menggunakan persektif tunggal, maupun *multiple*.

Jurnal Riset Terapan Akuntansi terbit 2 kali dalam setahun yaitu edisi Januari dan Juli. Naskah dapat dikirimkan ke alamat Redaksi.

### **PUBLIKASI**

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya  
Jalan Srijaya Negara Bukit Besar – Palembang 30139  
Telp. 0711-353414 Fax. 0711-355918

### **EDITORIAL**

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya  
Jalan Srijaya Negara Bukit Besar – Palembang 30139  
Telp. 0711-353414 Ext. 1048 Fax. 0711-355918  
Website: [jurnal.polsri.ac.id](http://jurnal.polsri.ac.id) Email: [jrtap@polsri.ac.id](mailto:jrtap@polsri.ac.id)



## DETERMINAN BELANJA MODAL PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA DI PROPINSI SUMATERA SELATAN

**Lambok Vera Riama Pangaribuan<sup>1)</sup>, Sri Hartaty<sup>2)</sup>, Aladin<sup>3)</sup>, Siska Aprianti<sup>4)</sup>, Rany Shinta Dewi<sup>5)</sup>,**

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya

E-mail: [p.vera98@yahoo.com](mailto:p.vera98@yahoo.com)

### *Abstract*

*This research is aim to find out and analyze the influences of variant Own-Source Revenue (PAD), variant General Allocations Grant (DAU), and Special Allocation Fund (DAK) toward Capital Expenditure either it's simultaneously or partially for districts or city government in South Sumatera province. Populations in this research are as much as 17 districts or city in South Sumatera province since 2009 until 2016. the sampling method chosen is purposive sampling. This research simultaneously proved that PAD variant, DAU variant, DAK variant, and SiLPA don't have significant influences towards capital expenditure. Meanwhile, SiLPA has significant influence toward capital expenditure.*

*Keywords: Varian PAD, Varian DAU, Varian DAK SiLPA, Capital Expenditure*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh varian Pendapatan Asli Daerah (PAD), varian Daftar Alokasi Umum (DAU)), varian Daftar Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal baik secara simultan maupun parsial pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2009-2016. Teknik pengambilan sampel dipilih secara *purposive sampling*. Penelitian ini membuktikan secara simultan varian PAD, varian DAU, varian DAK, dan SiLFA berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Varian PAD, varian DAU, varian DAK tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan SiLFA mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap belanja modal.

Kata Kunci: Varian PAD, Varian DAU, Varian DAK, SiLPA, Belanja Modal

## **PENDAHULUAN**

Bentuk pengelolaan keuangan daerah yang mandiri (mengatur dan mengurus sendiri) dapat dilihat dari bagaimana strategi pemerintah daerah (Pemda) dalam penganggaran untuk program dan kegiatan pemerintahan, penyediaan sarana dan prasarana publik dan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran merupakan inti dari pengelolaan keuangan daerah yang diurus secara mandiri, sehingga aktivitas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan semua terfokus pada anggaran. Anggaran memuat rencana keuangan berupa sumber-sumber penerimaan dan bagaimana penggunaannya ke dalam pengeluaran daerah.

Salah satu sumber penerimaan daerah yang terbesar adalah Pendapatan Asli Daerah

(PAD). Dalam mengusulkan perubahan target penerimaan daerah dari PAD lembaga perwakilan di daerah (DPRD) memiliki kecenderungan oportunistik untuk kemudian digunakan membiayai kenaikan dalam alokasi belanja yang diusulkan dalam pembahasan rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perda APBD). Setelah disetujui menjadi APBD, maka hampir selalu terjadi selisih antara anggaran pendapatan dengan realisasinya. Selisih antara anggaran dengan realisasi disebut varian. Hal itu diakibatkan karena asumsi yang buruk atau penganggaran yang tidak tepat.

Sumber pendapatan daerah lainnya yang berasal dari pusat yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang kemudian diberikan kepada daerah

dengan asumsi pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang nantinya untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Ahmad Yani, 2008: 142). Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004). Pemerolehan dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) harus mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah-daerah tertentu dalam rangka mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan termasuk dalam program prioritas nasional.

Dalam sumber-sumber penerimaan penggunaannya akan direalisasikan ke dalam pengeluaran daerah. Besaran pendapatan akan sangat menentukan besaran alokasi belanja. Pengeluaran belanja modal yang dilakukan saat ini akan memberikan manfaat jangka menengah dan panjang (Mahmudi, 2016: 162). Kenaikan alokasi belanja yang diajukan DPRD ternyata mengandung masalah keagenan, dimana perubahan dimanfaatkan untuk pemenuhan *self-interest* anggota dewan. Eksekutif memiliki kecenderungan menganggarkan belanja lebih besar dalam komponen tertentu untuk kemudian melakukan pergeseran (*virement*) pada saat terjadi perubahan anggaran. Menurut Mardiasmo (2009: 61) penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran merupakan bagian terpenting dari pengelolaan keuangan pemerintahan dan dapat dijelaskan dari berbagai perspektif, seperti politik, ekonomi, keuangan, dan akuntansi. Menurut Sabeli dan Ghozali (1996: 39) anggaran pemerintah merupakan pedoman bagi segala tindakan yang akan dilaksanakan dan di dalam anggaran disajikan rencana-rencana penerimaan dan pengeluaran dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasinya secara sistematis.

Adanya *mind-set* bahwa setiap tahun alokasi anggaran untuk SKPD akan mengalami peningkatan, yang didasarkan pada jumlah anggaran tahun sebelumnya, walaupun sudah dibantu dari dana pusat berupa Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, serta SiLPA yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah daerah. Target pendapatan tidak harus naik, tujuan perubahan anggaran yaitu untuk menyesuaikan dengan keadaan. Jika anggaran murni target pendapatan

ditetapkan terlalu tinggi, maka dalam perubahan anggaran target akan diturunkan. Persoalannya apakah belanja yang dulu direncanakan akan didanai dari penerimaan atas target pendapatan yang telah ditetapkan juga akan berkurang seiring dengan pengurangan target pendapatan yang bersangkutan.

Penelitian ini merujuk penelitian Yogi Kurniawan (2016) dengan penelitian Pengaruh varian PAD, varian dana perimbangan, dan sisa lebih perhitungan anggaran terhadap realisasi belanja modal dengan hasil Varian PAD, varian dana perimbangan, dan sisa lebih perhitungan anggaran secara simultan berpengaruh terhadap realisasi belanja modal. Varian PAD memiliki pengaruh positif terhadap realisasi belanja modal. Varian dana perimbangan memiliki pengaruh positif terhadap realisasi belanja modal. Sisa lebih perhitungan anggaran memiliki pengaruh positif terhadap realisasi belanja modal. Bedanya dengan penelitian ini pada variabel independen yaitu varian dana perimbangan, dimana dana perimbangan dibagi atas DAK dan DAU. Penelitian ini juga merujuk pada penelitian Syukriy Abdullah dan Ramadhaniatun Nazry(2014); Soraya Lestari , Syukriy Abdullah dan Hasan Basri (2014); Meridiana, Darwa-nis dan Syukriy Abdullah (2017); Nellyanti, Darwanis dan Syukriy Abdullah (2016) serta Dian Andalia, Darwa-nis dan Syukriy Abdullah (2012). Berdasarkan latar belakang , tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh varian PAD, varian DAK, varian DAU dan SiLPA terhadap Belanja Modal pada pemerintahan kabupaten dan kota propinsi Sumatera Selatan periode 2009 – 2016. Permasalahan yang akan di bahas adalah (1) Apakah terdapat pengaruh antara Varian PAD, Varian DAU, Varian DAK dan SiLPA terhadap Belanja Modal , (2) Apakah terdapat pengaruh Varian PAD terhadap Belanja Modal; (3) Apakah terdapat pengaruh Varian DAU terhadap Belanja Modal ; (4) Apakah terdapat pengaruh Varian DAK terhadap Belanja dan (5) Apakah terdapat pengaruh SiLPA terhadap Belanja Modal

## METODE PENELITIAN

### Data dan Sampel

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah kabupaten/kota dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD). Sampel dipilih dengan menggunakan beberapa kriteria (*purposive sampling*), yaitu:

1. Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang melaporkan dan mempublikasikan secara rutin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2012-2016.
2. Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang melaporkan dan mempublikasikan secara rutin realisasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah tahun anggaran 2012-2016.
3. Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang bukan daerah pemekaran pada tahun anggaran 2012-2016.

Sampel yang terpilih dan diolah mencakup 15 kabupaten/kota, yang terdiri dari 11 kabupaten dan 4 kota dalam tahun anggaran 2012-2016.

### Operasional Variabel

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian diukur dengan angka selisih antara realisasi dengan anggaran, baik untuk varian PAD, varian DAU, dan varian DAK. Variabel SiLPA dan belanja modal diukur dengan angka realisasi.

Variabel terikat (*dependent variable*) dalam penelitian ini adalah belanja modal yang diukur dengan menggunakan realisasi. Variabel bebas (*independent variable*) dalam penelitian ini adalah varian PAD, varian DAU, varian DAK yang diukur dengan menggunakan angka selisih antara realisasi dengan anggaran, dan SiLPA diukur dengan menggunakan angka realisasi.

### Model Regresi

Persamaan regresi yang digunakan dapat digambarkan seperti berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$$

Dengan Y adalah belanja modal (BM), a adalah konstanta,  $X_1$  adalah varian PAD (VPAD),  $X_2$  adalah varian DAU (VDAU),  $X_3$  adalah varian DAK (VDAK),  $X_4$  adalah SiLPA,  $b_1$ ,  $b_2$ ,  $b_3$ ,  $b_4$  adalah koefisien regresi dari variabel  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ ,  $X_4$ , dan e adalah variabel pengganggu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Pengolahan Data

Setelah melakukan pengujian dalam

pemilihan model data, maka model data yang terpilih yaitu *Fixed Effect Model* dengan menggunakan program EViews 10. Berikut tabel hasil regresi dengan *Fixed Effect Model*.

Tabel 1  
Hasil Regresi dengan *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 04/30/18 Time: 21:09

Sample: 2012 2016

Periods included: 5

Cross-sections included: 15

Total panel (balanced) observations: 75

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	0.289821	0.531242	0.545554	0.5875
X2	-0.336201	2.465254	-0.136376	0.8920
X3	-0.044036	0.256795	-0.171485	0.8645
X4	1.207750	0.171807	7.029676	0.0000
C	2.83E+11	1.90E+10	14.93642	0.0000

#### Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.863932	Mean dependent var	3.98E+11
Adjusted R-squared	0.820196	S.D. dependent var	2.20E+11
S.E. of regression	9.34E+10	Akaike info criterion	53.57329
Sum squared resid	4.89E+23	Schwarz criterion	54.16039
Log likelihood	-1989.999	Hannan-Quinn criter.	53.80772
F-statistic	19.75335	Durbin-Watson stat	2.051754
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: *Output EViews 10*

Berdasarkan *Fixed Effect Model*, maka diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$BM = 2.833897 + 0.289821 VPAD + 0.336201 VDAU - 0.044036 VDAK + 1.207750 SiLPA + e$$

Dari model regresi di atas dapat diidentifikasi bahwa varian PAD memiliki arah hubungan positif terhadap belanja modal, begitu juga dengan varian DAU memiliki arah hubungan yang positif terhadap belanja modal, namun varian DAK memiliki arah hubungan

negatif terhadap belanja modal, sedangkan SiLPA memiliki arah hubungan yang positif terhadap belanja modal. Maka regresi tersebut, diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta ( $a$ ) adalah 2.833897. Artinya jika varian PAD, varian DAU, varian DAK, dan SiLPA nilainya adalah 0 maka belanja modal nilainya positif, yaitu 2.833897.
2. Nilai koefisien regresi variabel varian PAD ( $b_1$ ) bernilai positif, yaitu 0.289821. Artinya bahwa setiap peningkatan varian PAD sebesar 1 %, maka belanja modal juga akan meningkat sebesar 0.289821 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.
3. Nilai koefisien regresi variabel varian DAU ( $b_2$ ) bernilai positif, yaitu 0.336201. Artinya bahwa setiap peningkatan varian DAU sebesar 1 %, maka belanja modal juga akan meningkat sebesar 0.180132 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.
4. Nilai koefisien regresi variabel varian DAK ( $b_3$ ) bernilai negatif, yaitu -0.044036. Artinya bahwa setiap peningkatan varian DAK sebesar 1 %, maka belanja modal juga akan meningkat sebesar -0.044036 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.
5. Nilai koefisien regresi variabel SiLPA ( $b_4$ ) bernilai positif, yaitu 1.207750. Artinya bahwa setiap peningkatan SiLPA sebesar 1 %, maka belanja modal juga akan meningkat sebesar 1.207750 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

## Pembahasan

### Pengaruh antara Varian PAD, Varian DAU, Varian DAK dan SiLPA terhadap Belanja Modal

Hasil regresi untuk Varian PAD, Varian DAU, Varian DAK, SiLPA terhadap Belanja Modal menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan. besaran nilai F sebesar 19.75335 dengan tingkat sig. 0.000000 lebih kecil dari signifikansi 0.05 (5%). Hal tersebut menunjukkan bahwa varian PAD, varian DAU, varian DAK dan SiLPA berpengaruh terhadap belanja modal. Semakin tinggi varian PAD, varian DAU, varian DAK dan SiLPA, maka belanja modal akan semakin meningkat. Nilai *R Square* sebesar 0.863 menunjukkan bahwa variabel independen pada penelitian ini, yaitu varian PAD, varian DAU, varian DAK dan SiLPA berpengaruh terhadap belanja modal sebesar 86.3 %. Sisanya sebesar 13.7 %

dipengaruhi oleh faktor-faktor atau variabel lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

Adapun kabupaten/kota yang memiliki pengaruh terbesar yang berperan dalam varian PAD, varian DAU, varian DAK, dan SiLPA terhadap belanja modal yaitu Kabupaten Musi Rawas, sedangkan pengaruh terendah yaitu diperoleh oleh Kota Pagar Alam. Berikut tabel *Fixed Cross-Section Effect*:

Tabel 2  
Fixed Cross-Section Effect

	CROSSID	Effect	Kabupaten/Kota
1	1	-1.28E+11	Kabupaten Ogan Komerling Ulu
2	2	1.48E+11	Kabupaten Ogan Komerling Ilir
3	3	1.28E+11	Kabupaten Muara Enim
4	4	-6.41E+10	Kabupaten Lahat
5	5	7.10E+10	Kabupaten Musi Rawas
6	6	2.72E+11	Kabupaten Musi Banyuasin
7	7	-2.63E+10	Kabupaten Banyuasin
8	8	-7.40E+10	Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan
9	9	-5.03E+10	Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur
10	10	-3.63E+10	Kabupaten Ogan Ilir
11	11	-7.70E+10	Kabupaten Empat Lawang
12	12	1.19E+11	Kota Palembang
13	13	-9.45E+10	Kota Prabumulih
14	14	-9.65E+10	Kota Pagar Alam
15	15	-9.21E+10	Kota Lubuk Linggau

Sumber: Data diolah (EViews 10)

Nilai *Cross-Section Effect* tertinggi diperoleh oleh Kabupaten Musi Rawas sebesar 71.011.024.377,88328. Artinya memberikan kontribusi tertinggi dalam pengaruh antara Varian PAD, Varian DAU, Varian DAK, dan SiLPA terhadap belanja modal sebesar 71.011.024.377,88328. Sedangkan nilai *Cross-Section Effect* terendah diperoleh oleh Kota Pagar Alam sebesar -96.539.722.846,6122. Artinya memberikan kontribusi terendah dalam pengaruh antara Varian PAD, Varian DAU, Varian DAK, dan SiLPA terhadap belanja modal memberikan kontribusi terendah sebesar 96.539.722.846,6122.

### Pengaruh antara Varian PAD terhadap Belanja Modal

Hasil regresi untuk Varian PAD terhadap Belanja Modal tidak menunjukkan adanya

pengaruh yang signifikan. besaran nilai t sebesar 0.545554 dengan tingkat sig. 0.5875 lebih besar dari signifikansi 0.05 (5%). Semakin tinggi varian PAD, maka belanja modal tidak akan begitu meningkat. Penelitian ini didukung oleh penelitian Abdullah dan Rona (2014) dengan hasil penelitian bahwa perubahan anggaran PAD tidak berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja modal.

Perubahan atas sumber penerimaan tidak dapat dipastikan apakah terjadi karena terlalu rendah ketika menetapkan target (*under-estimated*), misalnya dengan menggunakan asas minimal untuk penentuan target PAD atau karena perubahan asumsi misalnya dalam kebijakan pemerintah pusat yaitu dana perimbangan terutama DAU dan DAK. Penetapan penerimaan yang lebih rendah memberikan kesempatan bagi *budget actors* untuk menambah alokasi belanja saat perubahan anggaran, ketika realisasi penerimaan tersebut ternyata melampaui target selama pelaksanaan anggaran.

#### **Pengaruh antara Varian DAU terhadap Belanja Modal**

Hasil regresi untuk Varian DAU terhadap Belanja Modal tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan. besaran nilai t sebesar -0.136376 dengan tingkat sig. 0.8920 lebih besar dari signifikansi 0.05 (5%). Semakin tinggi varian DAU, maka belanja modal tidak akan begitu meningkat.

Biasanya informasi grants sudah disampaikan oleh pemberi kepada pemerintah daerah sebelum anggaran daerah ditetapkan. Informasi tentang dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) disampaikan oleh pemerintah pusat sebelum pembahasan anggaran daerah dilakukan oleh eksekutif (kepala daerah) dan legislatif (DPRD). Kedua jenis dana perimbangan tersebut tidak mengalami perubahan selama tahun berjalan karena ditentukan dengan menggunakan formula atau pertimbangan tertentu. Namun, sebagian jenis dana perimbangan lain dapat mengalami perubahan angka (varian) karena adanya perbedaan asumsi pada saat penghitungan awal dengan yang riil terjadi kemudian.

#### **Pengaruh antara Varian DAK terhadap Belanja Modal**

Hasil regresi untuk Varian DAK terhadap Belanja Modal tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan. besaran nilai t

sebesar -0.171485 dengan tingkat sig. 0.8645 lebih besar dari signifikansi 0.05 (5%). Semakin tinggi varian DAK, maka belanja modal tidak akan begitu meningkat.

Penggunaan DAK pada dasarnya merupakan kewenangan Pemda karena DAK merupakan bagian dari APBD. Meskipun demikian, dengan alasan agar penggunaan DAK oleh pemda sesuai dengan kepentingan nasional, Pemerintah Pusat mengatur penggunaan DAK melalui berbagai regulasi, seperti peraturan menteri keuangan dan peraturan menteri teknis berupa petunjuk teknis. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah.

#### **Pengaruh antara SiLPA terhadap Belanja Modal**

Hasil regresi untuk SiLPA terhadap Belanja Modal menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan. besaran nilai t sebesar 7.029676 dengan tingkat sig 0.0000 lebih kecil dari signifikansi 0.05 (5%). Semakin besar SiLPA, maka belanja modal akan semakin meningkat.

Penelitian ini didukung oleh penelitian Abdullah dan Rona (2014) dengan hasil penelitian bahwa perubahan sisa anggaran berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja modal. Sisa anggaran tahun sebelumnya merupakan sumber pembiayaan penting bagi pemerintah daerah, terutama pada awal tahun anggaran berikutnya. Hal ini disebabkan belum dapat terealisasinya pendapatan pada awal tahun anggaran. Besaran sisa anggaran tahun sebelumnya yang ditetapkan untuk tahun anggaran berjalan biasanya belum pasti atau masih dalam bentuk ramalan (*forecast*).

#### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini menyatakan bahwa model regresi yang digunakan berdistribusi normal, tidak terjadi masalah multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0.863 yang artinya 86.3% variabel belanja modal dijelaskan oleh variabel varian PAD, varian DAU, varian DAK, dan SiLPA, sedangkan sisanya sebesar 13.7% dijelaskan faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Penelitian ini menguji pengaruh varian PAD, varian DAU, varian DAK, dan SiLPA terhadap belanja modal. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa secara simultan

berpengaruh antara varian PAD, varian DAU, varian DAK, dan SiLPA terhadap belanja modal. Sedangkan secara parsial hanya variabel SiLPA berpengaruh terhadap belanja modal. Untuk varian PAD terhadap belanja modal, varian DAU terhadap belanja modal, dan varian DAK terhadap belanja modal tidak berpengaruh.

## SARAN

Penelitian ini memberikan beberapa saran untuk diperbaiki dalam penelitian-penelitian berikutnya, yaitu:

1. Pemerintah daerah harus lebih giat dalam menggali potensi sumber-sumber PAD masing-masing daerah agar lebih mampu melakukan pengeluaran demi kepentingan publik.
2. Dapat meneliti dan menambahkan variabel lain, seperti apa saja yang menyebabkan terjadinya varian dalam APBD.
3. Perlu dianalisis lebih mendalam tentang faktor-faktor apa yang berhubungan dengan angka yang tersaji dalam dokumen anggaran (APBD) dan laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Menggali lebih jauh siapa dari budget actors yang memiliki pengaruh paling besar atas terjadinya varian dan apa yang melatarbelakanginya.
5. Memodifikasi model, misalnya dengan menambahkan variabel pemoderasi (*moderating variable*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy. dan Nazry, Ramadhaniatun. 2015. Analisis varian anggaran pemerintah daerah penjelasan empiris dari perspektif keagenan. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis* Vol. 6, No. 2.
- Aprizay, Yudi Satrya, Darwanis dan Arfan, Muhammad. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 3, No. 1: 140-149.
- Bungkes, Panetir, Nadirsyah. dan Abdullah Syukriy. 2016. Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Sendiri dan Penerimaan Pembiayaan terhadap Belanja Modal. *Junal Magister Akuntansi*. Vol. 5, No. 3: 50-59.
- Febriana, Imas Sherli. dan Praptoyo, Sugeng. 2015. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*. Vol. 4, No. 9.
- Halim, Abdul. 2014. Manajemen Keuangan Sektor Publik (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah). Jakarta: Salemba Empat.
- Kasdy, Laila Murhani. 2017. Pengaruh Varian Pendapatan Asli Daerah (PAD), Varian Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Varian Belanja Modal dan Implikasinya terhadap Realisasi Belanja Modal di Indonesia. *Electronic theses and dissertations (ETD)*. Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh.
- Kosim, Engkos. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kota Banjar. *Journal of Management Review*. Vol. 1, No. 1: 13-23.
- Mahmudi. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: edisi ketiga. Yogyakarta: UPP STIM TKPN.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id) diakses pada tanggal 6 januari 2018 Pukul 09.00 WIB.
- [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) diakses pada tanggal 6 januari 2018 Pukul 11.00 WIB.

